

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2020-2022**

**Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Hermawan Wahyu Prayoga

Nim : 31402300138

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2020-2022**

**Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Hermawan Wahyu Prayoga

NIM : 31402300138

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022**

Disusun Oleh :


Hermawan Wahyu Prayoga

NIM : 31402300138

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024

Pembimbing,


Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.
NIK. 21406018

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2020-2022**


Disusun Oleh :
Hermawan Wahyu Prayoga
NIM : 31402300138

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Susunan Dewan Penguji

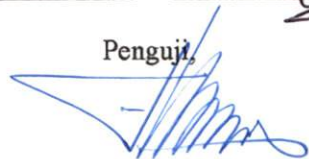
Pembimbing,


Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.
NIK 211406018

Penguji,


Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt., CA
NIK 211406020

Penguji,


Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., CA
NIK 210493034

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 29 November 2024

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD.

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermawan Wahyu Prayoga
NIM : 31402300138
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian Skripsi saya dengan judul:

“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan *E-Government* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan,



Hermawan Wahyu Prayoga
NIM. 31402300138

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022**

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu dari tahun 2020 – 2022. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur menggunakan nilai SAKIP. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP oleh KemenPANRB.

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan variabel yang terakhir adalah *e-government*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara itu tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, dan *e-government* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Modal, Kompleksitas Daerah, *E-Government*

***THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS
AND E-GOVERNMENT ON THE PERFORMANCE OF LOCAL
GOVERNMENT IN DISTRICT GOVERNMENTS IN CENTRAL
JAVA PROVINCE 2020-2022***

ABSTRACT

This research is expected to examine the effect of regional government characteristics and e-government on the performance of regional governments in regencies of Central Java Province over the period from 2020 to 2022. The performance of local governments is measured using the SAKIP score. The data collected is secondary data obtained from the SAKIP assessment results by KemenPANRB.

The analysis technique used is multiple linear regression to determine the effect of local government characteristics, which consist of the level of local government dependence on the central government, the level of regional wealth, capital expenditure, regional complexity, and the last variable is e-government.

The research results indicate that regional complexity has a significant positive effect on local government performance, while the level of local government dependence on the central government, the level of regional wealth, capital expenditure, and e-government do not affect local government performance.

This research is expected to contribute to local governments in improving their performance to provide optimal services to the community.

Keywords: Level of Regional Government Dependence on the Central Government, Level of Regional Wealth, Capital Expenditure, Regional Complexity, E-Government

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan *E-Government* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022”**.

Penulisan penelitian Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD., selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. Edi Supriyanto, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Bapak Suroto dan Ibu Juwarti selaku orang tua saya serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan *support* baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan penelitian Skripsi ini.
7. Terima kasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi RPL 2023 yang telah membantu dalam penulisan penelitian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan penelitian Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2024

Penulis,



Hermawan Wahyu Prayoga
NIM. 31402300138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2.2. Variabel – Variabel Penelitian	12
2.2.1. Kinerja Pemerintah Daerah.....	12
2.2.2. Karakteristik Pemerintah Daerah	13

2.2.3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat....	14
2.2.4. Tingkat Kekayaan Daerah	15
2.2.5. Belanja Modal.....	16
2.2.6. Kompleksitas Daerah	17
2.2.7. <i>E-Government</i>	17
2.3. Penelitian Terdahulu.....	18
2.4. Pengembangan Hipotesis	24
2.4.1. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	24
2.4.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	25
2.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah... ..	26
2.4.4. Pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.. ..	27
2.4.5. Pengaruh <i>E-government</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	27
2.5. Kerangka Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Populasi dan Sampel.....	28
3.2.1. Populasi.....	28
3.2.2. Sampel.....	29

3.3. Sumber dan Jenis Data	29
3.4. Metode Pengumpulan Data	30
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	30
3.5.1. Variabel Dependen.....	30
3.5.2. Variabel Independen.....	31
3.6. Teknik Analisis Data	34
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif.....	34
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	34
3.6.3. Analisis Regresi Berganda.....	36
3.6.4. Pengujian Model.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Objek Penelitian.....	39
4.2. Analisis Data	40
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	45
4.2.3. Hasil Uji Kelayakan Model	49
4.2.4. Pengujian Hipotesis (Uji t)	53
4.3. Pembahasan	55
4.3.1. Hubungan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	55
4.3.2. Hubungan Tingkat kekayaan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	56
4.3.3. Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	58

4.3.4. Hubungan Kompleksitas Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	59
4.3.5. Hubungan <i>E-Government</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah... ..	60
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Implikasi.....	64
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	65
5.4. Agenda Penelitian Mendatang.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan SAKIP.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Nilai dan Predikat SAKIP.....	31
Tabel 3.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat ...	32
Tabel 3.3 Tingkat Kekayaan Daerah.....	32
Tabel 3.4 Indeks SPBE.....	34
Tabel 4.1 Penyajian Data.....	39
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif.....	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>R Square</i>	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan SAKIP 2017-2022.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	28
Gambar 4.1 <i>Scatterplot</i> Dependensi Y	48

BAB I

PENDAHULUAN

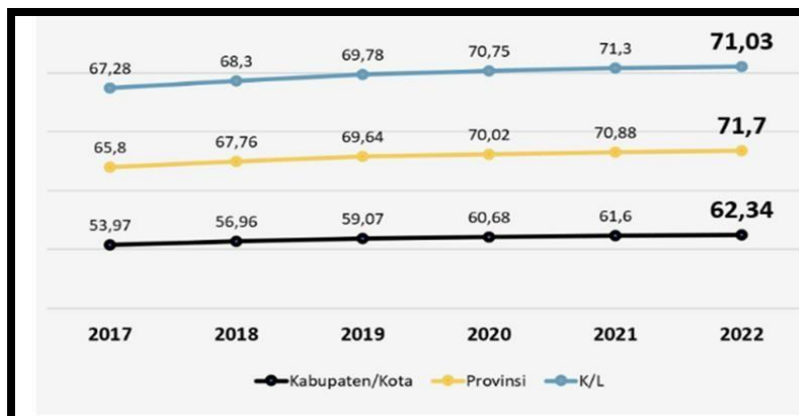
1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk bertindak sebagai pemerintahan sendiri. Karena kesadaran masyarakat yang semakin meningkat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, administrasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat menimbulkan gejolak yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah. Tanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepada pemerintah daerah akan meningkatkan tuntutan. Masyarakat akan menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraannya (Mardiasmo, 2016).

Dengan menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kinerja selama periode waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja erat terkait dengan kinerja pemerintah daerah sebelumnya. Dalam pemerintah daerah, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat secara keseluruhan yang mencakup seluruh proses pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pertanggungjawaban ini, pemerintah daerah menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mengikuti peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. (Wiguna et al., 2015).

Untuk mengukur kinerja yang telah direalisasikan pemerintah daerah, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan

penilaian melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Setiap tahun, KemenPAN-RB selalu menerbitkan hasil penilaian SAKIP pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1.1. Perkembangan SAKIP 2017-2022

Sumber : Kementerian PANRB

Jika melihat perkembangan SAKIP seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 2017-2022, nilainya mengalami peningkatan dari CC (Cukup) dengan range nilai 50-60 menjadi B (Baik) dengan range nilai 60-70. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mulai serius untuk meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Namun, jika dibandingkan dengan SAKIP pemerintah provinsi maupun kementerian/lembaga, SAKIP pemerintah kabupaten/kota masih berada satu level di bawahnya.

Tabel 1.1 Perbandingan SAKIP

No	Provinsi	Persentase Predikat SAKIP Kabupaten/Kota	
		A	BB
1	Jawa Timur	21,05%	52,63%
2	Jawa Tengah	2,63%	18,42%
3	DIY	80%	20%
4	Jawa Barat	3,70%	22,22%
5	Banten	0%	50%

Sumber: Data diolah dari KemenPANRB

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota terlemah diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Sebagai contoh, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 memiliki APBD sebesar Rp2,26 T, sementara itu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 memiliki APBD sebesar Rp1,92 T. Dengan APBD yang tidak sebesar Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul mampu memperoleh predikat SAKIP BB (Sangat Baik). Sedangkan Kabupaten Sukoharjo hanya mampu meraih predikat SAKIP B pada tahun 2022.

Menurut Asisten II Kabupaten Sukoharjo, masih perlu adanya perhatian terhadap beberapa indikator pada SAKIP mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan SAKIP. Akuntabilitas kinerja juga diukur dari sisi efektivitas, efisiensi dalam penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada *outcome* (hasil).

Kinerja pemerintah daerah seperti fenomena di atas dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya adalah karakteristik pemerintah daerah dan *e-government*. Karakteristik pemerintah daerah yang ada memiliki ciri-ciri khusus, menandai bahwa sebuah daerah dan memiliki perbedaan dengan daerah lainnya (Kusuma & Handayani, 2017). Beberapa karakteristik pemerintah daerah adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, kompleksitas daerah, dan belanja modal.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Ini terlihat dari dana alokasi umum, yang merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari

lingkungan eksternal, serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pemerintah pusat. Semakin besar DAU yang diberikan, semakin ketat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan alokasi. Dengan pemantauan yang intensif oleh pemerintah pusat maka memotivasi pemerintah daerah untuk memberikan kinerja yang baik (Sumarjo, 2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri et al. (2022) dan Dewata et al. (2018) didapatkan hasil bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Kusuma & Kurniasih (2017), yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah yang dapat diukur melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemampuan suatu wilayah untuk menggali PAD akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan wilayah tersebut. Sumber daya moneter yang berasal dari PAD lebih signifikan daripada sumber daya moneter yang berasal dari luar PAD. (Julitawati, 2012). Penelitian Safitri et al. (2022) serta Wijayanti & Suryandari (2020) diperoleh hasil tidak ada pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Kurniasih (2017) menemukan hasil yang berbeda di mana tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Salah satu faktor dalam mencapai kinerja pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut PP No 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang tinggi menunjukkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Kinerja pemerintah daerah akan meningkat dengan lebih banyak pembangunan yang dilakukan (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri et al. (2022), Andani et al. (2019), dan Dewata et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel terakhir yakni *e-government*. *E-Government* menjadi salah satu sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi meningkatkan kinerja pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pemerintah harus segera bertransformasi menuju *e-government* dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju. Pemerintah pusat dalam hal ini melakukan kontrol terhadap implementasi *e-government* dengan melakukan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian yang dilakukan oleh Ulfi et al. (2022), menyatakan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, penulis menambah variabel independen baru yakni kompleksitas daerah sebagai unsur keterbaruan. Kompleksitas daerah ini menggambarkan bahwa semakin kompleksnya pemerintahan maka diperlukan pemerintahan yang semakin besar untuk memahami kompleksitas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika di Indonesia, ini digambarkan dengan semakin banyaknya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu,

keterbaruan pada penelitian ini terletak pada variabel dependen kinerja pemerintah daerah yang diproksikan dengan nilai SAKIP. Penggunaan nilai SAKIP ini menjadi kebaruan dibanding penelitian sebelumnya yang menggunakan nilai EPPD. Pada nilai EPPD, komponen penilaian didasarkan pada (2) dua komponen, pertama yakni evaluasi kinerja makro yang dilakukan dengan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD, serta kedua evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sementara nilai SAKIP memiliki komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Jika dibandingkan, nilai SAKIP memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena diawali dari perencanaan hingga evaluasi, sementara nilai EPPD hanya terfokus pada hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil berbeda – berbeda serta kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang cukup lemah dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali yang lebih terbaru dengan kinerja pemerintah daerah yang diproksikan dengan nilai SAKIP pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang akan dianalisa dalam sebuah penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diminta untuk mengeksplor dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di daerahnya guna memberikan kinerja yang prima kepada masyarakat. Namun, berbagai faktor dan dinamika yang terjadi di daerah mengakibatkan kinerja suatu pemerintah daerah menjadi tidak merata. Oleh karena itu, saat ini pemerintah daerah dituntut untuk inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat peningkatan akuntabilitas terutama kinerja yang saat ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis mengangkat kembali penelitian pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menambahkan variabel independen kompleksitas daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- 2) Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- 3) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- 4) Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- 5) Apakah *e-government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah;
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah;
- 3) Menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah;
- 4) Menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas daerah terhadap kinerja pemerintah daerah;
- 5) Menguji dan menganalisis pengaruh *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan riset dalam akuntansi pemerintahan mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dengan mempertimbangkan karakteristik pemerintah daerah dan *e-government* yang diperoleh pemerintah daerah.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan bagi masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas serta memberikan masukan atas kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Godfrey (2010) menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak atau perjanjian antara satu atau lebih pihak (*principal*) dan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan sebuah jasa atas kepentingan pemilik, di mana kekuasaan untuk mengambil keputusan diberikan kepada agen selama pelaksanaan jasa tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang mereka, agen memberikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal.

Teori keagenan juga membentuk organisasi sektor publik, terlepas dari ada tidaknya hubungan dan masalah pemerintah daerah yang berkaitan dengan keagenan (Halim & Syukuriy, 2005). Dari perspektif teori keagenan, hubungan antara masyarakat dan pemerintah mirip dengan hubungan antara prinsipal dan agen; masyarakat berfungsi sebagai prinsipal, dan pemerintah berfungsi sebagai agen. Prinsipal memberikan wewenang dan sumber daya kepada agen melalui pajak, antara lain, dan sumber daya lainnya.

Menurut Artha et al. (2014), teori agensi mengatakan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak agensi (pemerintah) dan pihak prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu, pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja agen dalam melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Prinsipal membutuhkan pihak independen dalam pemerintahan, dalam hal ini BPK dan APIP,

untuk meyakinkan prinsipal bahwa laporan agen adalah benar karena mereka tidak tahu segala sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh agen.

Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perselisihan antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena kepentingan yang berbeda dimiliki oleh kedua belah pihak yang terikat. Di samping keinginan untuk memuaskan prinsipal, pemerintah juga ingin memaksimalkan kepentingannya.

Kaitan teori keagenan pada penelitian ini dapat dilihat pada kinerja yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah berhubungan seperti prinsipal dan agen. Prinsipal harus mengatur agen dan memberikan sumber daya kepada agen melalui pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

Menurut Widodo (2002), sebagai pihak yang ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Ini dilakukan untuk menilai berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Masalah keagenan muncul jika keputusan agen merugikan prinsipal. Karena prinsipal tidak mengetahui segala sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh agen, pihak ketiga diperlukan untuk meyakinkan prinsipal bahwa laporan agen adalah benar.

2.2. Variabel – Variabel Penelitian

2.2.1. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006), kinerja adalah pencapaian administrasi atas program atau kebijakan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Sementara itu, menurut Mahsun (2006), kinerja adalah gambaran strategi manajemen yang tercantum dalam pencapaian dari tingkat kegiatan, program, atau kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, yang tercakup dalam perencanaan strategis organisasi. Karena kesadaran masyarakat bahwa administrasi publik bertanggung jawab atas kinerja rakyat, akan terjadi gejolak dan ketidakpuasan. Penyelenggara berdasar amanat dari rakyat membuat kondisi ini untuk mendorong peningkatan terhadap pengukuran kinerja. menyatakan bahwa pengukuran kinerja pada sektor publik dapat dilihat dari sejauh mana indikator pengukuran kinerja relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan organisasi sektor publik untuk berbagai tujuan yang lebih luas, seperti perencanaan dan pengendalian, pembelajaran, akuntabilitas dan evaluasi, termasuk pelaporan indikatornya. Furqan & Hilda (2015) berpendapat bahwa sektor publik dapat diukur kinerjanya dengan melihat dari seberapa relevan dan bermanfaat indikator pengukuran kinerja untuk pengambilan keputusan organisasi sektor publik dalam berbagai tujuan yang lebih luas, seperti evaluasi, akuntabilitas, perencanaan dan pengendalian, dan pembelajaran, serta pelaporan indikator.

Kinerja pada pemerintah daerah dapat diukur dengan salah satunya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.2.2. Karakteristik Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah memiliki karakteristik tertentu yang membedakan pemerintah daerah yang satu dengan dari pemerintahan lainnya. Ciri-ciri ini menandai sebuah daerah dan membedakannya dari pemerintahan lainnya Kusuma & Handayani, 2017). Disinyalir bahwa perbedaan yang ada diantara masing-masing daerah dapat berdampak pada kinerja pemerintahan di seluruh Indonesia. Menurut Kusuma & Handayani, (2017), karakteristik pemerintah daerah termasuk tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, ukuran daerah, belanja daerah, kemakmuran, dan *leverage*. Sementara itu, Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah hal-hal yang membedakan pemerintah daerah dari yang lain. Beberapa contoh karakteristik ini termasuk tingkat kekayaan, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, besarnya belanja modal.

2.2.3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat

Safitri et al. (2022) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat adalah hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan tersebut dapat dilihat dari dana alokasi umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah. Menurut Kusuma & Kurniasih (2017), tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat diwujudkan dalam DAU yang masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewata et al. (2018), yang mengatakan bahwa ketergantungan daerah dapat diukur dari besarnya dana transfer dalam bentuk DAU oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Indikator tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma & Kurniasih (2017) diukur dengan membandingkan DAU terhadap total pendapatan daerah. Selain itu, Dewata et al. (2018), dan Safitri et al. (2022) juga mengukur indikator ini dengan membandingkan DAU terhadap total pendapatan daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Safitri et al. (2022) menunjukkan hasil tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Kurniasih (2017) dan Dewata et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.4. Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut Armaja et al. (2017) dalam penelitian Safitri et al. (2022) mengatakan bahwa tingkat kekayaan daerah adalah suatu kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, pemerintah daerah menggunakan semua sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Wijayanti & Suryandari (2020) juga menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah direfleksikan oleh PAD sebagai salah satu pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi asli daerah. Menurut Artha et al. (2014) dalam penelitian Kusuma & Kurniasih (2017), PAD menjadi satu-satunya sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu wilayah sehingga PAD dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kekayaan daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator tingkat kekayaan daerah dalam penelitian Safitri et al. (2022) dan Wijayanti & Suryandari (2020) diukur dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan. Sementara penelitian Kusuma & Kurniasih (2017) mengukur tingkat kekayaan daerah berdasarkan PAD.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2022) dan Wijayanti & Suryandari (2020) menunjukkan hasil tidak ada pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian

Kusuma & Kurniasih (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.5. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Halim (2014) dalam penelitian Andani et al. (2019), salah satu kelompok belanja daerah berdasarkan jenisnya mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Ini karena kegiatan belanja modal dianggap dapat memiliki efek multiplikasi pada perekonomian masyarakat melalui pembangunan jalan dan jembatan, pabrik, dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan pada penelitian Safitri et al. (2022) dan Dewata et al. (2018) yakni dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja daerah. Sementara indikator yang dipakai pada penelitian Andani et al. (2019) diukur berdasarkan total realisasi belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewata et al. (2018) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014) serta Ara et al., (2016) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.6. Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah menggambarkan kondisi di mana terdapat berbagai faktor yang berbeda-beda (diferensiasi) yang mempengaruhi tata kelola baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Wijayanti & Suryandari, 2020). Semakin banyak diferensiasi fungsional dalam pemerintah daerah akan semakin banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia terkait pengungkapan (Mandasari, 2009).

Indikator variabel ini jika dilihat dari penelitian Priyono et al. (2018) adalah berdasarkan jumlah OPD. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Suryandari (2020), dan Putri (2022) juga diukur berdasarkan jumlah OPD.

Hasil penelitian atas variabel ini oleh Wijayanti & Suryandari (2020) menunjukkan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al. (2018) dan Putri (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompleksitas daerah terhadap kinerja fiskal.

2.2.7. E-Government

E-government adalah kemajuan terus menerus dalam penyampaian layanan, partisipasi publik, dan partisipasi pemerintahan melalui transformasi hubungan internal dan eksternal berbasis teknologi informasi, khususnya internet, menurut UNDESA (2018). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah mengatur penggunaan e-government di Indonesia.

Implementasi *e-government* di Indonesia awalnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan hasil berupa Pemingkatan *E-Government* Indonesia atau biasa disebut PeGi. Penilaian ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2017, setelah diberlakukannya Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Setelah itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menerima mandat untuk menjalankan evaluasi ini, sehingga pemeringkatan yang semula bernama PeGi berganti menjadi indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Azis (2022), variabel ini diukur dengan indeks SPBE yang diperoleh pemerintah daerah. Penelitian oleh Ulfi (2022) juga mengukur variabel ini dengan *e-government* yang diterima oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian terhadap variabel ini yang dilakukan oleh Ulfi (2022) menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Azis (2022) bahwa *e-government* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Yayuk Harumiati, Payamta (2014)	2011	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel Dependen: kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia Variabel Independen:	- Tingkat kekayaan daerah, belanja modal, dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				1) Ukuran pemerintah daerah; 2) Tingkat kekayaan daerah; 3) Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat; 4) Belanja modal; 5) Status daerah; 6) Temuan audit BPK	kinerja pemerintah daerah - Ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
2.	Utomo (2015)	2012	Seluruh kabupaten/kota di Indonesia	Variabel Dependen: kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Variabel Independen: 1) Ukuran pemerintah daerah; 2) Tingkat kekayaan daerah; 3) Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat; 4) Belanja modal; 5) <i>Leverage</i> ; 6) Temuan audit BPK.	- Ukuran pemerintah daerah dan Tingkat kekayaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; - Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, leverage, temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
3.	Priyan Mardya Kusuma & Lulus	2015	Seluruh kabupaten/kota di Indonesia	Variabel dependen: Kinerja pemerintah kabupaten/kota Variabel independen:	- Opini audit, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah tidak

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Kurniasih (2017)			1) Opini audit; 2) Tingkat kekayaan daerah; 3) Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat; 4) Belanja daerah.	berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota; - Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
4.	Evada Dewata, Hadi Jauhari, Siska Aprianti, Eka Nurfa Hijria (2018)	2013-2015	Seluruh kabupaten/kota di Indonesia	Variabel Dependen: Kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Variabel Independen: 1) Rasio desentralisasi fiskal; 2) Tingkat ketergantungan pada pusat; 3) Belanja modal; 4) Umur pemerintah daerah kabupaten/kota; 5) Status lokal; 6) Populasi; 7) Opini audit.	- Rasio desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, umur pemda, status local, populasi, dan opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemda di Indonesia - Secara parsial, umur pemda, populasi, dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda di Indonesia. - Sementara itu, tingkat ketergantungan pada pusat memiliki pengaruh negatif yang signifikan

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
					<p>terhadap kinerja pemda di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk rasio desentralisasi fiskal dan status local tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda di Indonesia.
5.	Mega Andani, Sarwani, Novita Weningtyas Respati (2019)	2010-2016	Seluruh provinsi di Indonesia	<p>Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Provinsi</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran daerah; 2) Kemakmuran; 3) Belanja modal; 4) Opini audit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia - Kemakmuran daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia
6.	Lia Anggraini, Sri Rahayu, Junaidi (2019)	2011-2015	Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi	<p>Variabel Dependen: Kinerja pemerintah daerah (kabupaten/kota di Provinsi Jambi)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran pemerintah daerah; 2) Tingkat kekayaan daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran pemerintah daerah, belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. - Tingkat kekayaan daerah,

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				3) Tingkat ketergantungan pada pusat; 4) Rasio belanja modal; 5) Ukuran legislatif; 6) Leverage.	ketergantungan pada pusat, secara simultan ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, ketergantungan pada pusat, belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage berpengaruh terhadap kinerja pemda pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
7.	Ibnu Hamzami Ulfi, Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani (2022)	2018-2020	Pemerintah daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: 1) Belanja Modal; 2) <i>E-Government</i>	- Belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - <i>E-Government</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
8.	Yulia Wijayanti dan Dhini Suryandari (2020)	2014-2015	Pemerintah kabupaten/kota di Jawa dan Bali	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1) Ukuran daerah; 2) Belanja daerah; 3) Tingkat kekayaan daerah;	- Ukuran daerah, belanja daerah, dan <i>e-government</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				4) Leverage; 5) Kompleksitas daerah; 6) Temuan audit BPK; 7) <i>E-government</i> .	- Tingkat kekayaan daerah, leverage, kompleksitas daerah, dan temuan audit BPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
9.	Susan Azis (2022)	2018	Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa	Variabel Dependen: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1) Opini audit BPK; 2) Temuan audit; 3) Tindak lanjut hasil audit; 4) Belanja daerah; 5) <i>E-Government</i>	- Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah - Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah - Tindak lanjut hasil temuan, belanja daerah, <i>e-government</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
10.	Rika Henda Safitri, Umi Kalsum, Trie Sartika	2016-2020	Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1) Ukuran daerah;	- Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak mempunyai

No	Peneliti dan Tahun	Tahun Pengamatan	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Pratiwi (2023)			2) Tingkat kekayaan daerah; 3) Tingkat ketergantungan daerah; 4) Belanja modal; 5) Akuntabilitas.	pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah - Tingkat ketergantungan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

2.4.1. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Agency Theory menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku agen harus dapat memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kinerja pemerintah yang optimal. Pemerintah daerah diberikan anggaran oleh pemerintah pusat dalam rangka mendanai kegiatan yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang diberikan merupakan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya baik kepada Pemerintah Pusat maupun masyarakat.

Setiap pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang berbeda. Ini ditunjukkan oleh penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk membiayai operasi pemerintahan dan menyediakan layanan

kepada masyarakat. Pemerintah pusat juga akan memantau pelaksanaan DAU, yang mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik (Mustikarini & Fitriyasi, 2012). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah akan berkinerja baik apabila tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat semakin tinggi. Hal ini akan mendorong kinerja pemerintah daerah meningkat secara proporsional.

Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriyasi (2012), Marfiana & Kurniasih (2013), Ara et al., (2016), dan Anggraini et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah

Pemerintah daerah sebagai agen menurut *Agency Theory* tidak dapat dipercaya prinsipal untuk bertindak sebaik-baiknya demi kepentingannya komunitas. Hal ini berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh wilayah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan harapan masyarakat untuk kebaikan layanan dan kinerja.

PAD menunjukkan tingkat kekayaan daerah karena PAD adalah satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya daerah. Oleh karena itu, PAD dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kekayaan daerah (Artha et al., 2014). Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi

seharusnya memiliki lebih banyak keleluasaan untuk memanfaatkan kekayaan asli daerah mereka untuk melakukan berbagai macam pengeluaran daerah yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerjanya pun juga dapat semakin baik (Mustikarini & Fitriyasi, 2012).

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Ara et al. (2016), Juweny (2016), Anggraini et al. (2019) yang menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam *Agency Theory*, masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak untuk memberikan penilaian supaya pemerintah daerah berkinerja lebih baik dalam hal kinerja pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat bisa lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pengeluaran yang salah satunya berupa belanja modal agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kinerjanya.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik berupa infrastruktur ataupun sarana yang dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat sebanding dengan manfaat belanja modal (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014) serta Ara et al., (2016) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis ini adalah:

H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.4. Pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Agency Theory menjelaskan bahwa sering terjadi adanya asimetris informasi antara agen dan prinsipal. Hal ini diminimalisir oleh pemerintah daerah yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan memperbanyak urusan yang menjadi prioritas ditandai dengan banyaknya OPD yang dibentuk.

Semakin banyak jumlah OPD maka semakin luas cakupan pemerintah dalam menangani setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang implikasinya adalah kinerja yang meningkat. Semakin banyak diferensiasi fungsional dalam pemerintah daerah akan semakin banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia (Mandasari, 2009) yang berarti semakin banyak gagasan untuk peningkatan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al. (2018) dan Putri (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompleksitas daerah terhadap kinerja. Dari uraian tersebut, maka hipotesis ini adalah:

H4: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.5. Pengaruh *E-government* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam *Agency Theory* muncul asimetris informasi yang memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus

berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel dengan melakukan peningkatan dan pengembangan terhadap *e-government* ini.

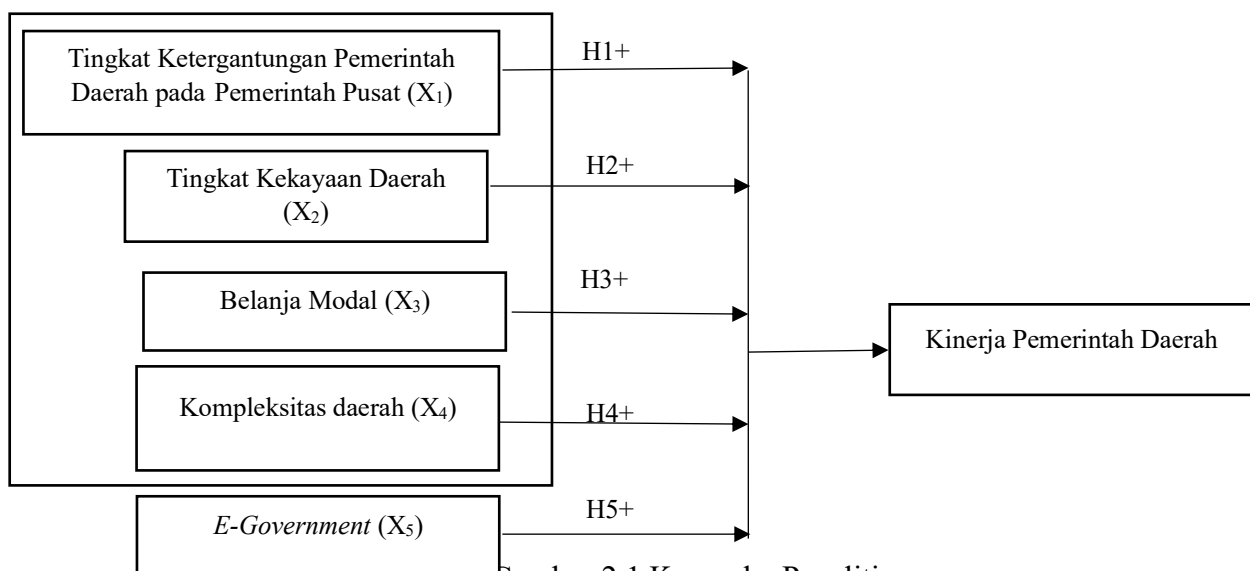
Pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat melalui implementasi *e-government* yang berkualitas. Kinerja pemerintah daerah akan semakin baik apabila kualitas *e-government* yang dimiliki juga semakin baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ulfi (2022), *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka hipotesis ini adalah:

H5: *E-government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.5. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yakni variabel independen berupa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan *e-government*. Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, informasi dikumpulkan dalam bentuk angka maupun data yang berupa kata – kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel biasanya menggunakan pengambilan sampel acak (*random sampling*), pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis kuantitatif atau statistik data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mempelajari pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, baik yang berupa benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil berdasar prosedur tertentu sehingga dapat menunjukkan keterwakilan populasinya (Sugiyono, 2019). Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun 2020-2022. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel non acak (*purposive sampling*), yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun kriteria pengambilan sampel meliputi hal-hal berikut ini:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 – 2022.
- b) Data nilai hasil penilaian SAKIP dan Indeks SPBE oleh KemenPANRB.
- c) Tersedianya data jumlah OPD pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini karena sumbernya adalah bukti, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Sekaran, 2011). Data yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diambil dari PPID Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, nilai SAKIP

yang berasal dari *website* masing-masing pemerintah daerah dan indeks SPBE yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah strategi pengumpulan data dengan mempelajari atau menilai dokumen – dokumen atau sumber – sumber tertulis serta arsip – arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian (Mukhtar, 2013). Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh melalui dokumen yang diminta melalui PPID dan diunduh pada portal – portal instansi terkait dengan variabel penelitian.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya (Sugiyono, 2019). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Furqan & Hilda (2015) mengatakan bahwa pengukuran kinerja (pemerintah daerah) pada sektor publik dapat dilihat dari seberapa relevan dan bermanfaat indikator pengukuran kinerja untuk pengambilan keputusan organisasi sektor publik. Ini dapat bermanfaat dalam berbagai tujuan yang lebih luas, seperti evaluasi, pembelajaran, akuntabilitas, perencanaan dan pengendalian, serta pelaporan indikator.. Pengukuran kinerja

pemerintah daerah pada penelitian ini berdasarkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen – komponen yang memberikan gambaran tingkat SAKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 3.1. Nilai dan Predikat SAKIP

Predikat	Nilai
AA (Sangat Memuaskan)	>90 – 100
A (Memuaskan)	>80 – 90
BB (Sangat Baik)	>70 – 80
B (Baik)	>60 – 70
CC (Cukup)	>50 – 60
C (Kurang)	>30 – 50
D (Sangat Kurang)	>0 – 30

Sumber: PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021

3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sugiyono, 2019). Variabel independen pada penelitian ini antara lain tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, kompleksitas daerah, belanja modal, dan *e-government*.

3.5.2.1. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat menurut Safitri et al. (2022) merupakan hubungan ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Variabel ini diukur dengan membandingkan DAU terhadap total pendapatan daerah yang jika dirumuskan adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Kriteria penilaian atas tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat diklasifikasikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat

Persentase	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma et al. 2010)

3.5.2.2. Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan daerah adalah suatu kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya menurut Armaja et al. (2017) dalam penelitian Safitri et al. (2022). Indikator tingkat kekayaan daerah dalam penelitian (Safitri et al., 2022) diukur dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah yang jika dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Kriteria penilaian atas tingkat kekayaan daerah dapat diklasifikasikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tingkat Kekayaan Daerah

Persentase	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma et al. 2010)

3.5.2.3. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator dari variabel ini yakni membandingkan realisasi belanja modal terhadap realisasi belanja daerah yang jika dirumuskan adalah sebagai berikut.

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$$

3.5.2.4. Kompleksitas Daerah

Kompleksitas tata kelola menggambarkan kondisi di mana terdapat berbagai faktor yang berbeda-beda karakteristik (diferensiasi) yang mempengaruhi tata kelola baik secara langsung maupun secara tidak langsung Wijayanti & Suryandari (2020). Variabel tingkat kompleksitas daerah ini diukur dari jumlah OPD (Wijayanti & Suryandari, 2020).

3.5.2.5. *E-government*

Menurut Sutopo et al. (2017), *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan fasilitas administrasi pemerintah serta menyediakan layanan kepada masyarakat.

E-Government diukur berdasarkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Indeks SPBE

Indeks	Kategori
< 1,8	Kurang
1,8 – < 2,6	Cukup
2,6 - < 3,5	Baik
3,5 - < 4,2	Sangat Baik
4,2 – 5,0	Memuaskan

Sumber: PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian model.

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk mendapatkan suatu gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari sum, *mean*, range, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016). Langkah uji statistik diperuntukkan guna mendapatkan penyebaran data dalam *mean*, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak bias. Terdapat beberapa jenis uji asumsi klasik. Setiap jenis pengujian asumsi klasik memiliki tujuan yang berbeda dan tidak semua uji asumsi klasik akan dilakukan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas.

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan dengan maksud untuk memperjelas data dalam model regresi penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi data memenuhi asumsi normal jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

3.6.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya tiap variabel independen atau variabel bebas memiliki korelasi tinggi antara satu dengan yang lain. Apabila terdapat multikolinieritas maka model regresi adalah bias. Selain tidak bias, model regresi dikategorikan baik jika antar variabel tidak ortogonal (Ghozali, 2016). Nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)* merupakan indikasi kuat untuk menyimpulkan ada atau tidaknya multikolinieritas. Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat permasalahan multikolinieritas (Ghozali, 2016).

3.6.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui model regresi memiliki hubungan (korelasi) antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dan periode sebelumnya atau tidak (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak adalah dengan menggunakan uji *run test*. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas.

3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian yang terdapat heteroskedastisitas maka model regresi dinyatakan tidak valid. Pengujian heteroskedastisitas dimaksud untuk menilai apakah terdapat perbedaan varian dari residual pada model regresi. Jenis Analisa heteroskedastisitas yang difungsikan pada penelitian ini adalah uji glejser dan uji *scatterplot*. Jika model regresi dalam nilai *P value* kolom signifikansi $> 0,05$ maka berhasil melewati uji glejser karena tidak ada tanda heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas jika tidak membentuk pola tertentu dan titik tidak beraturan (Ghozali, 2016)

3.6.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji interaksi yang melibatkan antara 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah dengan lebih dari 1 (satu) variabel bebas yang terdiri dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan *e-government* perlu dilakukan *multiple linear regression* atau analisis regresi berganda. Adapun persamaan dari regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

X₁ = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah

Pusat

X_2 = Tingkat Kekayaan Daerah

X_3 = Belanja Modal

X_4 = Kompleksitas Daerah

X_5 = *E-Government*

e = Error

3.6.4. Pengujian Model

3.6.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) difungsikan untuk memberi ukuran seberapa besar kemampuan model dalam berkontribusi pengaruh terhadap variabel dependen. Besaran nilai (R^2) berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu) atau ($0 < x < 1$). Apabila nilai R^2 mendekati angka 1 (satu), maka variabel variabel independen semakin kuat berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai (R^2) mendekati angka 0 (nol), maka variabel variabel independen semakin lemah berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai (R^2) menghasilkan angka - (minus), maka variabel variabel independen semakin tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian yang menggunakan data survei bersifat *cross section* cenderung memiliki nilai (R^2) yang rendah atau mendekati 0 (nol). Berbeda dengan penelitian yang menggunakan data *time series* (data runtut waktu) atau data sekunder biasanya nilai (R^2) akan lebih besar (Ghozali, 2016). Penggunaan (R^2) memiliki kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel yang diinput dalam model. Tiap tambahan satu variabel bebas, maka dipastikan meningkat apapun pengaruh dan signifikansi terhadap variabel dependen. Banyak peneliti

menyarankan memakai nilai *adjusted* pada saat evaluasi model regresi paling baik. Berbeda dengan (R^2), nilai *adjusted* (R^2) lebih fleksibel dapat naik maupun turun jika satu variabel bebas ditambahkan dalam model (Ghozali, 2016).

3.6.4.2.Uji F

Uji F atau uji serentak dilaksanakan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama atau simultan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis diterima atau ditolak ditentukan ambang batas 5% atau (0,05).

Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kinerja pemerintah daerah.

3.6.4.3.Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (Ghozali, 2016). Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak pada derajat kepercayaan 5% (0,05) yang ditentukan dengan kriteria uji "t", yakni nilai t hitung $>$ t tabel serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($<$ 0,05) untuk mendapat kesimpulan terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (I. Ghozali, 2016).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu tahun 2020-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan *website* pemerintah daerah untuk data jumlah OPD dan nilai SAKIP. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Sampel ditentukan berdasar kriteria yang telah ditentukan dan relevan dengan penelitian. Dari populasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/kota, kemudian diambil sampel sebanyak 29 kabupaten dengan rentang waktu tahun 2020-2022 sehingga data yang terkumpul sejumlah 87. Adapun rinciannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Penyajian Data

No	Keterangan	Jumlah
1.	Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	35
2	Pemerintah daerah selain kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	(6)
3	Pemerintah daerah yang data nilai SAKIP dan Indeks SPBE tidak dapat diperoleh	(0)
4	Pemerintah daerah yang data OPDnya tidak dapat diperoleh	(0)
5	Rentang waktu tahun 2020-2022 (3 tahun)	87
6	Jumlah sampel akhir	87

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam analisis statistik deskriptif, variabel penelitian dijelaskan dengan melihat jumlah data, nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dan nilai minimum merupakan nilai terendah. Rata-rata digunakan untuk menentukan nilai pusat distribusi data dan standar deviasi mengukur sebaran data di sekitar nilai rata-rata. Hasil statistik deskriptif menggunakan SPSS pada penelitian ini disajikan pada tabel ini.

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_TKKETER	87	.35	.47	.4079	.02607
X2_TKKEKAY	87	.10	.25	.1734	.03263
X3_BM	87	.07	.27	.1493	.03743
X4_KOMPLEK	87	31.00	54.00	44.3218	4.81638
X5_SPBE	87	1.93	3.76	2.8913	.35859
Y_SAKIP	87	60.02	80.53	66.3383	4.02309
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut:

- 1) SAKIP dengan nilai terendah (minimum) sebesar 60,02 atau dengan predikat B (Baik) yang diperoleh Kabupaten Semarang pada tahun 2020, sedangkan untuk nilai tertinggi (maksimum) sebesar 80,53 atau predikat A (Memuaskan) yang diperoleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) SAKIP untuk kabupaten di Jawa Tengah pada rentang waktu 2020-2022 sebesar 66,3383 atau predikat B (Baik) berdasarkan tabel 3.1 yang menunjukkan bahwa kinerja seluruh kabupaten di Jawa Tengah sudah baik. Simpangan baku (standar deviasi)

untuk SAKIP adalah sebesar 4,02309 yang berarti adanya anomali SAKIP yang dikaji pada nilai rata-rata sebesar 4,02309. Nilai standar deviasi variabel dependen SAKIP yang lebih kecil dibanding rata-ratanya menunjukkan bahwa *subjective norm* (norma subjektif) memiliki tingkat variasi data yang normal.

Rendahnya SAKIP di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah daerah setempat belum mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dari mulai perencanaan hingga pelaporan jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, tingginya SAKIP di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dari mulai tahapan perencanaan hingga pelaporan apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dengan nilai terendah (minimum) sebesar 35% yang berasal dari Kabupaten Kudus pada tahun 2021, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 47% yang berasal dari Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) atas tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2020-2022 adalah sebesar 40,79% atau berkategori tinggi jika merujuk pada tabel 3.2. Simpangan baku (standar deviasi) tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat adalah sebesar 2,607% yang berarti adanya anomali variabel yang dikaji pada nilai rata-rata adalah sebesar 2,607%. Nilai standar deviasi variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat yang lebih kecil dibanding rata-

ratanya menunjukkan bahwa *subjective norm* (norma subjektif) memiliki tingkat variasi data yang normal.

Rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa pemerintah daerah setempat mampu memperoleh pendapatan daerah secara optimal yang digunakan untuk membiayai belanja daerahnya dengan campur tangan pemerintah pusat berupa dana transfer yang tidak terlalu besar. Sedangkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat di Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh belum cukup untuk membiayai belanja daerahnya sehingga memerlukan dana transfer yang cukup besar dari pemerintah pusat.

- 3) Tingkat kekayaan daerah dengan nilai terendah (minimum) diperoleh Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 sebesar 10%, sedangkan untuk nilai tertinggi (maksimum) diperoleh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar 25%. Nilai rata-rata tingkat kekayaan daerah pada seluruh kabupaten di Jawa Tengah untuk rentang tahun 2020-2022 sebesar 17,34% atau berkategori kurang jika merujuk pada tabel 3.3. Simpangan baku (standar deviasi) tingkat kekayaan daerah adalah sebesar 3,23% yang berarti anomali yang muncul atas variabel yang dikaji pada nilai rata-rata sebesar 3,23%. Nilai standar deviasi variabel tingkat kekayaan daerah yang lebih kecil dibanding rata-ratanya menunjukkan bahwa *subjective norm* (norma subjektif) memiliki tingkat variasi data yang normal.

Rendahnya tingkat kekayaan daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 diakibatkan karena rendahnya PAD yang mampu diperoleh Kabupaten Wonogiri

Rendahnya PAD ini diakibatkan oleh pemerintah daerah yang belum mampu menggali dan mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang ada di daerah. Sedangkan tingginya tingkat kekayaan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 karena PAD yang diperoleh mulai optimal terlebih Kabupaten Sukoharjo adalah daerah penunjang Kota Surakarta yang saat ini mulai berkembang kawasan bisnis sehingga pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

- 4) Belanja modal dengan nilai terendah (minimum) adalah sebesar 7% yang berasal dari Kabupaten Pemasang pada tahun 2022, sedangkan untuk belanja modal tertinggi (maksimum) sebesar 27% yang dicapai oleh Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel belanja modal dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah pada rentang tahun 2020-2022 adalah sebesar 14,93%. Kondisi tersebut dapat dikatakan kurang karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur (belanja modal) minimal 40%. Simpangan baku (standar deviasi) pada variabel ini adalah sebesar 3,743% yang berarti adanya anomali variabel yang dikaji pada nilai rata-rata sebesar 3,743%. Nilai standar deviasi variabel belanja modal yang lebih kecil dibanding rata-ratanya menunjukkan bahwa *subjective norm* (norma subjektif) memiliki tingkat variasi data yang normal.

Rendahnya belanja modal di Kabupaten Pemasang menunjukkan bahwa pemerintah daerah setempat bukan memprioritaskan belanja modal sebagai bagian dari pembangunan fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur publik di

daerah tersebut. Sedangkan tingginya belanja modal di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut cukup memprioritas belanja modal untuk pembangunan fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur publik di daerah tersebut.

- 5) Kompleksitas daerah dengan nilai terendah (minimum) sebesar 31 yang berada di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) adalah sebesar 54 yang berada di Kabupaten Banyumas dari tahun 2020-2022. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah untuk rentang 2020-2022 adalah sebesar 44,3218. Simpangan baku (standar deviasi) pada variabel ini adalah sebesar 4,81638 yang berarti adanya anomali variabel yang dikaji pada nilai rata-rata sebesar 4,81638. Nilai standar deviasi variabel kompleksitas yang lebih kecil dibanding rata-ratanya menunjukkan bahwa *subjective norm* (norma subjektif) memiliki tingkat variasi data yang normal.

Rendahnya kompleksitas daerah di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa kurangnya diferensiasi urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam bentuk OPD pelaksana urusan, sehingga OPD yang ada harus menjalankan beberapa urusan yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Sedangkan tingginya kompleksitas daerah di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pemerintah daerah setempat menaruh perhatian pada berbagai urusan, Berbagai urusan yang mendapat perhatian dijalankan dengan membentuk OPD pelaksana guna fokus terhadap urusan yang dijalankan.

- 6) *E-Government* dengan nilai terendah (minimum) adalah sebesar 1,93 yang didapatkan oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020, sedangkan nilai

tertinggi (maksimum) adalah 3,76 yang diraih oleh Kabupaten Kendal pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah pada rentang tahun 2020-2022 adalah sebesar 2,8913 atau berkategori Baik berdasarkan tabel 3.4. Simpangan baku (standar deviasi) untuk variabel ini adalah sebesar 0,35859 yang berarti adanya anomali variabel penelitian ini pada nilai rata-rata adalah sebesar 0,35859. Nilai standar deviasi variabel *e-government* yang lebih kecil dibanding rata-ratanya menunjukkan bahwa *subjective norm* (norma subjektif) memiliki tingkat variasi data yang normal.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji non parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), Apabila nilai nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		87	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05444159	
Most Extreme Differences	Absolute	.090	
	Positive	.090	
	Negative	-.065	
Test Statistic		.090	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.076	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.076	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.069
		Upper Bound	.082

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1535910591.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS

Dari hasil uji non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,076. Hasil pengujian tersebut lebih besar dari yang disyaratkan, yakni 0,05. Dengan hasil tersebut, diketahui bahwa sebaran data berdistribusi normal.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk melihat tiap variabel independen atau variabel bebas memiliki korelasi tinggi antara satu dengan yang lain atau tidak. Apabila terdapat multikolinearitas maka model regresi adalah bias. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3.401	.317		10.724	<.001		
	X1_TKKETER	-.160	.134	-.165	-1.193	.236	.500	1.999
	X2_TKKEKAY	.073	.044	.221	1.662	.100	.537	1.863
	X3_BM	.209	.172	.126	1.217	.227	.884	1.132
	X4_KOMPLEK	.178	.058	.323	3.055	.003	.853	1.172
	X5_SPBE	.064	.049	.131	1.310	.194	.949	1.054

a. Dependent Variable: Y_SAKIP

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* dari tiap variabel $> 0,1$ dan nilai VIF (*variable inflation factor*) < 10 yang berarti bahwa model regresi bebas multikolinearitas.

4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk menguji bahwa dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau tidak. Berikut merupakan hasil pengujian autokorelasi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00999
Cases < Test Value	43
Cases ≥ Test Value	44
Total Cases	87
Number of Runs	37
Z	-1.617
Asymp. Sig. (2-tailed)	.106

a. Median

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *runs test*, diperoleh hasil bahwa nilai asymp. sig (2-tailed) adalah 0,106. Hasil tersebut lebih besar dari syarat, yakni 0,05 ($0,106 > 0,05$). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2017) menyatakan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari satu residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas muncul apabila model regresi memiliki nilai yang sama, diharapkan model regresi adalah residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang konstan. Berikut adalah hasil pengujiannya.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

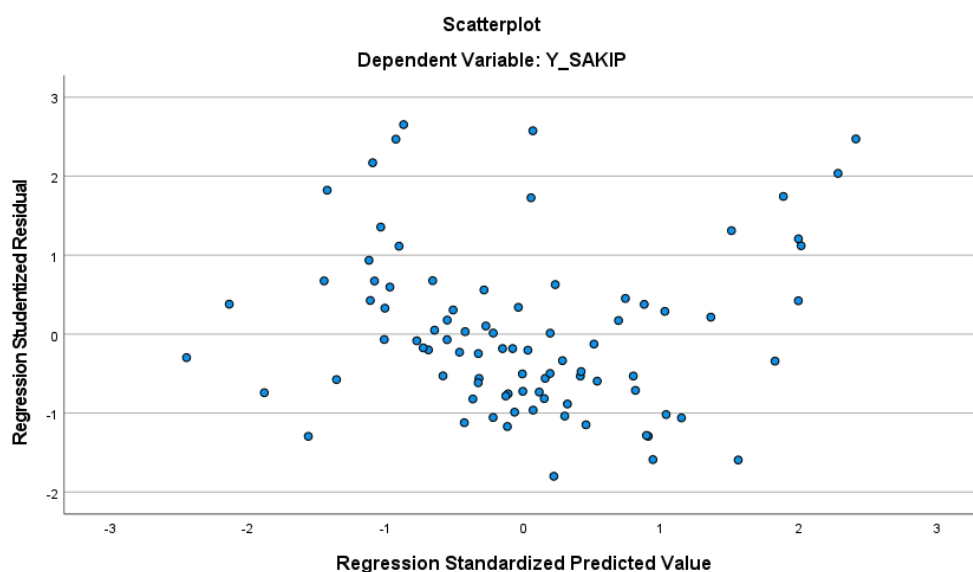
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.051	.190		.267	.790
	X1_TKKETER	.063	.080	.120	.788	.433
	X2_TKKEKAY	.048	.026	.268	1.825	.072
	X3_BM	.085	.103	.094	.822	.414
	X4_KOMPLEK	.031	.035	.105	.899	.372
	X5_SPBE	.002	.029	.007	.064	.949

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Hasil pengujian glejser diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel bebas berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, jika dilihat dari grafik *scatterplot* didapatkan hasil seperti gambar ini.



Gambar 4.1 *Scatterplot* Dependensi Y

Sumber: Data sekunder diolah dari SPSS

Dari gambar tersebut juga mendukung hasil pengujian glejser yang menunjukkan bahwa pola yang muncul pada *scatterplot* menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

4.2.3. Hasil Uji Kelayakan Model

Metode analisis ini menjadi salah satu analisis yang banyak digunakan karena mudah dan memiliki kekuatan yang cukup dalam menjelaskan pengaruh suatu variabel bebas ke variabel terikatnya adapun pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

4.2.3.1. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F dan sig. hitung. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel dan sig. lebih kecil dari 0,05 sehingga pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.075	5	.015	4.782	<.001 ^b
	Residual	.255	81	.003		
	Total	.330	86			

a. Dependent Variable: Y_SAKIP

b. Predictors: (Constant), X5_SPBE, X4_KOMPLEK, X2_TKKEKAY, X3_BM, X1_TKKETER

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Hasil pengujian data di tabel menunjukkan bahwa F hitung adalah 4,782, sementara F tabel adalah 2,483 yang berarti F hitung lebih besar daripada F tabel ($4,782 > 2,483$). Selain itu, nilai signifikansi $<0,001$ yang lebih kecil daripada nilai signifikansi yang disyaratkan yakni 0,05. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (X1_TKKETER), tingkat kekayaan daerah (X2_TKKEKAY), belanja modal (X3_BM), kompleksitas daerah (X4_KOMPLEK), dan *e-government* (X5_SPBE) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi diuji untuk menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau dapat dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi linear berganda diukur oleh nilai *Adjusted R Square* dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji *R Square*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.477 ^a	.228	.180	.05610

a. Predictors: (Constant), X5_SPBE, X4_KOMPLEK, X2_TKKEKAY, X3_BM, X1_TKKETER

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,180 (18%) yang berarti variabel independen yang terdiri dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan *e-government* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar 18%. Sedangkan sisanya sebanyak 82% variasi tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

4.2.3.3. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.401	.317		10.724	<.,001
	X1_TKKETER	-.160	.134	-.165	-1.193	.236
	X2_TKKEKAY	.073	.044	.221	1.662	.100
	X3_BM	.209	.172	.126	1.217	.227
	X4_KOMPLEK	.178	.058	.323	3.055	.003
	X5_SPBE	.064	.049	.131	1.310	.194

a. Dependent Variable: Y_SAKIP

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Dari hasil uji regresi linier di tabel, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,401 - 0,160X_1 + 0,073X_2 + 0,209X_3 + 0,178X_4 + 0,064X_5 + e$$

Rumus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dengan nilai konstanta 3,401, hal ini menunjukkan jika semua variabel independen yang meliputi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan *e-government*, maka nilai kinerja pemerintah daerah 3,401.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (X_1) yaitu sebesar -0,160 dengan pengaruh tidak searah dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,160 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat kekayaan daerah (X_2) yaitu sebesar 0,073 dengan pengaruh searah dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel tingkat kekayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,073 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel belanja modal (X_3) yaitu sebesar 0,209 dengan pengaruh searah dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,209 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- e. Nilai koefisien regresi untuk variabel kompleksitas daerah (X_4) yaitu sebesar 0,178 dengan pengaruh searah dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa jika kompleksitas daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,178 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

- f. Nilai koefisien regresi untuk variabel *e-government* (X_5) yaitu sebesar 0,064 dengan pengaruh searah dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika *e-government* mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,064 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

4.2.4. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel dependen. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

- H1 : Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
- H2 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
- H3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
- H4 : Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
- H5 : *E-Government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Untuk menentukan hipotesis diterima atau tidak adalah dengan melihat nilai sig yang harus lebih besar dari 0,05 dan t hitung $>$ t tabel, sehingga dapat diambil kesimpulan ada atau tidaknya pengaruh variabel x terhadap variabel y. Adapun t

hitung yang menjadi dasar penentuan kesimpulan dalam uji ini dijelaskan sebagai berikut:

t tabel: $t(\alpha/2; n-k-1)$

t tabel: $t(0,025; 81) = 1,989$

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.9 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat ($X1_TKKETER$), diketahui signifikansi untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,236 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,193 < 1,989$ yang berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka **H1 ditolak**.
- b. Variabel tingkat kekayaan daerah ($X2_TKKEKAY$), diketahui signifikansi untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,100 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,662 < 1,989$ yang berarti bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka **H2 ditolak**.
- c. Variabel belanja modal ($X3_BM$), diketahui signifikansi untuk pengaruh X_3 terhadap Y adalah sebesar $0,227 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,217 < 1,989$ yang berarti bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka **H3 ditolak**.
- d. Variabel kompleksitas daerah ($X4_KOMPLEK$), diketahui signifikansi untuk pengaruh X_4 terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,005 > 1,989$ yang berarti bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka **H4 diterima**.

- e. Variabel *e-government* ($X5_SPBE$), diketahui signifikansi untuk pengaruh X_5 terhadap Y adalah sebesar $0,194 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,310 < 1,989$ yang berarti bahwa *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka **H5 ditolak**.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah pada seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dilakukan interpretasi dengan hasil sebagai berikut.

4.3.1. Hubungan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dari penelitian ini dihitung dengan mengkomparasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total pendapatan daerah. Dari hasil uji t , diketahui bahwa variabel ini memiliki nilai hitung $-1,193$ yang lebih kecil dari t tabel yaitu $1,989$ dengan signifikansi $0,236$ yang lebih besar dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di seluruh pemerintah kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil tersebut maka **H1 ditolak**. Hal ini berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat menunjukkan seberapa besar suatu pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Kontribusi terbesar dari dana transfer pemerintah pusat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang menyumbang rata-rata 40,79% dari tabel 4.2 yang menunjukkan kategori tinggi berdasar tabel 3.2 pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. DAU bersifat *block grant* yang artinya penggunaan dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada daerah sesuai dengan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka desentralisasi.

Jika melihat hasil penelitian, arah dari variabel ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU, maka semakin rendah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, begitu pun sebaliknya semakin rendah DAU yang ditransfer ke daerah maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Seringkali, DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak digunakan efisien dan efektif oleh pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat menjadi kurang memadai. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.3.2. Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat kekayaan daerah dari penelitian ini dihitung dengan mengkomparasikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total

pendapatan daerah. Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel ini memiliki nilai hitung 1,662 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,989 dengan signifikansi 0,100 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di seluruh pemerintah kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil tersebut maka **H2 ditolak**. Hal ini berarti tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat kekayaan daerah berkaitan dengan PAD, artinya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan kekayaan daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah menunjukkan semakin tinggi pula PADnya yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Suatu daerah yang semakin kaya, maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin rendah. Pada penelitian ini, tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan karena rata-rata tingkat kekayaan daerah berdasar tabel 4.2 sebesar 17,34%. Kondisi ini dinilai kurang berdasar tabel 3.3, sehingga belum mampu secara signifikan mempengaruhi kinerja pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah belum mampu menggali pendapatan daerah secara optimal dengan sumber daya yang ada. Selain itu, perlu juga diikuti dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang tegas untuk mengakomodasi potensi pendapatan di daerahnya. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah daerah belum mampu secara mandiri membiayai program dan kegiatan di daerah dengan optimal sehingga masih harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, namun diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Artha et al. (2015), Wijayanti & Suryandari (2020), dan Safitri et al. (2022) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Kurniasih (2017) dan Anggraini et al., (2019) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.3.3. Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal dari penelitian ini dihitung dengan mengkomparasikan realisasi belanja modal dengan realisasi belanja daerah. Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel ini memiliki nilai hitung 1,217 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,989 dengan signifikansi 0,227 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di seluruh pemerintah kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil tersebut maka **H3 ditolak**. Hal ini berarti belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian, belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur (belanja modal) minimal 40%. Sementara itu, rata-rata belanja modal pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berdasar

tabel 4.2 baru 17,34%. Kondisi ini masih jauh dari ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU HKPD tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang optimal guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini juga tidak terlepas dari keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah terutama dari pendapatan daerah yang diperoleh juga belum maksimal, sehingga belum dapat mengalokasikan belanja modal yang sesuai dengan ketentuan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, namun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andani et al., (2019), Anggraini et al. (2019), Safitri et al., (2020) yang juga menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Harumiati & Payamta (2014) dan Ara et al., (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.3.4. Hubungan Kompleksitas Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kompleksitas daerah dari penelitian ini dihitung dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel ini memiliki nilai hitung 3,055 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,989 dengan signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di seluruh pemerintah kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil tersebut maka **H4 diterima**. Hal ini berarti kompleksitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah daerah membentuk OPD bertujuan untuk mengurus daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan. OPD yang dibentuk menyelenggarakan tugas-tugas spesifik yang telah ditetapkan oleh kepala daerahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya OPD pada suatu pemerintah daerah berkontribusi positif pada kinerja pemerintah daerah. Banyaknya OPD yang dibentuk merupakan suatu komitmen pemerintah daerah untuk fokus pada urusan-urusan yang perlu mendapatkan atensi khusus yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga memperjelas tugas dan fungsi masing-masing OPD sehingga beban kerja yang ditanggung tidak berat. Oleh karena itu, kinerja organisasi dapat tercapai yang mendukung pencapaian tujuan dan kinerja pemerintah daerah juga.

Hasil penelitian pada variabel ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), menyatakan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al., (2018) dan Wijayanti & Suryandari (2020), menyatakan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.3.5. Hubungan *E-Government* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

E-Government dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel ini memiliki nilai hitung 1,310 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,989 dengan signifikansi 0,194 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di seluruh pemerintah kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil tersebut maka **H5 ditolak**. Hal ini berarti *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan *e-government* di era digital saat ini merupakan hal krusial yang terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi yang diprosikan indeks SPBE pada seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah belum mampu menjadi penyumbang positif kinerja pemerintah daerah. Meskipun rata-rata dari tabel 4.2 sebesar 2,89 dengan kategori baik berdasar tabel 3.4, namun tidak berpengaruhnya terhadap kinerja dapat terjadi karena terlalu banyaknya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membuat aplikasi yang dianggap dapat mempermudah pekerjaan dan pelayanan optimal kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ada 27 ribu aplikasi yang dibuat oleh instansi pemerintah baik dari level kementerian hingga pemerintah daerah dengan anggaran yang besar, yakni Rp6,7 triliun. Aplikasi yang dibuat tersebut berjalan sendiri-sendiri dan tidak tersinkronisasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih fungsi dan menyebabkan pelayanan publik menjadi rumit dan sulit. Menurut Ekonom *Economic and Law Studies* (Celios) Nailul Huda, banyaknya aplikasi ini juga disebabkan adanya ego sektoral dari pimpinan instansi, ketika ada pimpinan yang baru maka akan dibentuk aplikasi baru sebagai bentuk legasi dari pimpinan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, namun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Azis (2022) yang menyatakan bahwa *e-government* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfi et al., (2022) yang menyatakan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan *e-government* pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut.

- (1) Variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga **H1 ditolak**.
- (2) Variabel tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga **H2 ditolak**.
- (3) Variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga **H3 ditolak**.
- (4) Variabel kompleksitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat dikatakan bahwa peningkatan kompleksitas daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah, sehingga **H4 diterima**.
- (5) Variabel *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga **H5 ditolak**.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan, maka implikasi yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang pemerintahan serta dapat digunakan sebagai wacana dalam sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu akademik dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, motivasi, dan evaluasi untuk mengembangkan dan menyusun strategi, kebijakan, dan program-program yang lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara komprehensif.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1) Adanya kendala data nilai SAKIP karena data yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berupa predikat SAKIP. Oleh karena itu, penulis mencari data tersebut melalui penelusuran di *website* masing-masing pemerintah kabupaten yang dimungkinkan data yang diunggah kurang akurat. Hal ini mengakibatkan hasil penelitian kurang akurat.
- 2) Penelitian ini hanya membatasi pada variabel karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah

pusat, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, kompleksitas daerah, dan *e-government* yang hanya berpengaruh sebesar 18%. Sementara itu, terdapat 82% variabel bebas lainnya yang tidak dapat dijelaskan di luar penelitian ini.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Hasil penelitian ini dan keterbatasan yang telah ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai ide bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya memerlukan adanya pengembangan variabel untuk memperkaya dan memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik dan secara spesifik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti indeks Reformasi Birokrasi, opini audit BPK, nilai temuan BPK. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan peran terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, G. (2016). Penaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) dan Leverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*, 3(1), 1036–1050.
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i1.7428>
- Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringish, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(4 (1)), 1–17.
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Artha, R. D., Basuki, P., & Alamsyah. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 214–229.
- Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Dewata, E., Jauhari, H., Aprianti, S., & Hijria, E. N. (2018). The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on the Performance of District and City Governments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 151–162. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.9057>
- Furqan, A. C., & Hilda, R. (2015). Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Pendapatan & Belanja Daerah sebagai Pemediasi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23

- (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J. (2010). *Accounting Theory* (7th ed). McGraw Hill.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat.
- Halim, A., & Syukuriy, A. (2005). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). <http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah/>
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Hilmi, Z., Amiruddin, & Martani, D. (2012). Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Julitawati, E. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, 1, 15–29.
- Juweny, S. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Universitas Lampung.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/778>
- Kusuma, P. M., & Kurniasih, L. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Equity, Vol. 20 No. 1 (2017): EQUITY*.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (The Influence of Size, Prosperity, Legislative Size, Leverage on Regional Government Financial Performance in Indonesia). *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). BPFPE.
- Mandasari, P. (2009). *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in*

Indonesian Local Government. Universitas Sebelas Maret.

- Mardiasmo. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). BPFE.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), 1–16.
- Masdiantini, P., & Erawati Ni. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan *E-government* Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan: Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba Empat.
- Mustikarini, W. A., & Fitriyasi, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Forum Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nugroho, R. A., & Muid, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 513–527.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Priyono, N., Arifah, S., & Wulandari, E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 7(2), 404–410. <https://doi.org/10.30591/monex.v7i2.922>
- Putri, N. R. (2022). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kompleksitas daerah Terhadap Kinerja Keuangan

- Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020). Universitas Siliwangi.
- Rizki Utama, F., Evana, E., & Rika Gamayuni, R. (2019). *The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 197–208. <https://doi.org/10.21632/irjbs.12.2.197-208>
- Safitri, R. H., Kalsum, U., & Pratiwi, T. S. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. *Owner*, 7(1), 219–230. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267>
- Saputro, E., & Mahmud, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3.8299>
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D, dan Penelitian Pendidikan)* (A. Nuryanto (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(8(1)), 1–94.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*, 1–76.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453–1481.
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government, Audit Opinion, and Performance. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4).

- Ulfi, I.B., Afiah, N.N., Mulyani, S. (2022). Implikasi Belanja Modal dan *E-Government* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. *Indonesian Governance Journal, Vol 5 No 2*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., & Darmawan, N. A. S. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Univeritas Pendidikan Ganesha, 3*(Vol.3 No 1 (2015)), 1–12.
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal, 9*(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	63,03	65,08	65,23
2	Kabupaten Banyumas	76,47	78,46	80,53
3	Kabupaten Batang	66,14	66,3	67,27
4	Kabupaten Blora	63,67	64,78	65,4
5	Kabupaten Boyolali	69,36	71,44	68,28
6	Kabupaten Brebes	63,09	62,86	63,26
7	Kabupaten Cilacap	73,98	74,26	74,58
8	Kabupaten Demak	64,95	66,4	68,96
9	Kabupaten Grobogan	62,96	63,27	64,25
10	Kabupaten Jepara	64,13	64,53	65,69
11	Kabupaten Karanganyar	68,13	68,67	68,98
12	Kabupaten Kebumen	63,35	65,18	65,49
13	Kabupaten Kendal	68,55	67,83	68,97
14	Kabupaten Klaten	62,88	65,14	66,27
15	Kabupaten Kudus	69,45	71,13	72,05
16	Kabupaten Magelang	61,13	62,25	63,04
17	Kabupaten Pati	64,6	65,04	65,47
18	Kabupaten Pekalongan	64,02	64,33	64,89
19	Kabupaten Pemalang	67,7	68,88	68,93
20	Kabupaten Purbalingga	64,06	65,94	67,02
21	Kabupaten Purworejo	62,29	63,1	64,47
22	Kabupaten Rembang	63,82	64,15	64,74
23	Kabupaten Semarang	60,02	62,18	62,86
24	Kabupaten Sragen	62,74	63,14	64,47
25	Kabupaten Sukoharjo	61,77	63,58	65,04
26	Kabupaten Tegal	62,56	63,26	64,25
27	Kabupaten Temanggung	63,84	64,73	65,17
28	Kabupaten Wonogiri	73,17	73,88	75,72
29	Kabupaten Wonosobo	65,45	66,09	66,96

Lampiran II Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	45,15%	42,95%	43,66%
2	Kabupaten Banyumas	39,24%	36,98%	37,36%
3	Kabupaten Batang	42,88%	40,49%	41,96%
4	Kabupaten Blora	40,95%	38,78%	39,44%
5	Kabupaten Boyolali	40,15%	38,88%	39,75%
6	Kabupaten Brebes	41,28%	39,17%	41,14%
7	Kabupaten Cilacap	40,67%	38,17%	38,53%
8	Kabupaten Demak	36,89%	36,21%	35,65%
9	Kabupaten Grobogan	41,08%	39,25%	39,74%
10	Kabupaten Jepara	40,36%	39,02%	39,69%
11	Kabupaten Karanganyar	43,25%	41,72%	40,04%
12	Kabupaten Kebumen	43,34%	41,64%	41,22%
13	Kabupaten Kendal	42,68%	39,19%	39,49%
14	Kabupaten Klaten	45,27%	44,72%	44,24%
15	Kabupaten Kudus	37,55%	34,55%	35,65%
16	Kabupaten Magelang	41,49%	39,48%	37,95%
17	Kabupaten Pati	41,89%	40,63%	40,87%
18	Kabupaten Pekalongan	42,93%	41,91%	41,81%
19	Kabupaten Pemasang	45,68%	42,53%	44,27%
20	Kabupaten Purbalingga	43,07%	40,39%	41,03%
21	Kabupaten Purworejo	42,93%	39,91%	41,59%
22	Kabupaten Rembang	38,75%	37,58%	38,69%
23	Kabupaten Semarang	41,13%	37,11%	38,14%
24	Kabupaten Sragen	44,79%	42,13%	44,97%
25	Kabupaten Sukoharjo	42,11%	40,00%	41,82%
26	Kabupaten Tegal	40,98%	37,63%	39,08%
27	Kabupaten Temanggung	41,62%	38,21%	39,65%
28	Kabupaten Wonogiri	47,24%	46,01%	46,64%
29	Kabupaten Wonosobo	42,53%	40,27%	41,16%

Lampiran III Tingkat Kekayaan Daerah

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kekayaan Daerah		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	11,96%	15,04%	13,92%
2	Kabupaten Banyumas	20,07%	21,85%	24,01%
3	Kabupaten Batang	14,85%	17,72%	17,19%
4	Kabupaten Blora	14,08%	14,67%	14,97%
5	Kabupaten Boyolali	18,95%	21,19%	18,74%
6	Kabupaten Brebes	13,05%	16,40%	14,03%
7	Kabupaten Cilacap	18,76%	22,17%	21,27%
8	Kabupaten Demak	18,84%	18,81%	19,86%
9	Kabupaten Grobogan	13,86%	16,10%	16,41%
10	Kabupaten Jepara	18,11%	17,16%	18,37%
11	Kabupaten Karanganyar	18,13%	19,70%	22,73%
12	Kabupaten Kebumen	14,59%	16,67%	17,99%
13	Kabupaten Kendal	16,74%	19,09%	19,33%
14	Kabupaten Klaten	12,80%	12,27%	13,84%
15	Kabupaten Kudus	19,04%	23,44%	20,14%
16	Kabupaten Magelang	13,85%	15,20%	16,91%
17	Kabupaten Pati	13,96%	14,26%	14,37%
18	Kabupaten Pekalongan	16,58%	16,68%	16,53%
19	Kabupaten Pemasang	13,41%	14,03%	14,00%
20	Kabupaten Purbalingga	16,06%	18,39%	15,14%
21	Kabupaten Purworejo	14,07%	19,14%	15,11%
22	Kabupaten Rembang	17,39%	21,14%	19,17%
23	Kabupaten Semarang	20,01%	23,82%	20,55%
24	Kabupaten Sragen	17,83%	22,99%	16,74%
25	Kabupaten Sukoharjo	23,01%	24,93%	24,58%
26	Kabupaten Tegal	16,59%	20,65%	19,36%
27	Kabupaten Temanggung	16,79%	18,42%	16,29%
28	Kabupaten Wonogiri	12,06%	10,48%	14,71%
29	Kabupaten Wonosobo	13,40%	17,27%	13,79%

Lampiran IV Belanja Modal

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	17,16%	14,44%	11,81%
2	Kabupaten Banyumas	13,53%	15,41%	16,23%
3	Kabupaten Batang	11,33%	13,61%	12,59%
4	Kabupaten Blora	16,61%	14,16%	21,25%
5	Kabupaten Boyolali	20,54%	23,51%	27,08%
6	Kabupaten Brebes	19,14%	14,05%	19,73%
7	Kabupaten Cilacap	17,73%	17,53%	18,77%
8	Kabupaten Demak	15,52%	14,74%	16,82%
9	Kabupaten Grobogan	16,20%	14,46%	20,45%
10	Kabupaten Jepara	13,99%	10,04%	9,88%
11	Kabupaten Karanganyar	8,49%	10,77%	13,70%
12	Kabupaten Kebumen	13,50%	12,27%	12,42%
13	Kabupaten Kendal	8,67%	8,32%	16,58%
14	Kabupaten Klaten	14,34%	16,52%	20,22%
15	Kabupaten Kudus	13,49%	9,55%	19,32%
16	Kabupaten Magelang	13,10%	14,18%	16,11%
17	Kabupaten Pati	15,37%	13,86%	12,05%
18	Kabupaten Pekalongan	14,38%	12,25%	14,97%
19	Kabupaten Pemalang	15,68%	8,88%	7,40%
20	Kabupaten Purbalingga	8,69%	12,26%	13,99%
21	Kabupaten Purworejo	15,89%	16,51%	22,96%
22	Kabupaten Rembang	10,81%	12,92%	17,76%
23	Kabupaten Semarang	11,77%	15,55%	16,87%
24	Kabupaten Sragen	15,05%	10,96%	18,01%
25	Kabupaten Sukoharjo	13,82%	16,16%	12,99%
26	Kabupaten Tegal	12,38%	20,57%	14,21%
27	Kabupaten Temanggung	7,47%	16,01%	16,02%
28	Kabupaten Wonogiri	15,31%	18,90%	15,99%
29	Kabupaten Wonosobo	15,81%	16,78%	21,70%

Lampiran V Kompleksitas Daerah

No	Kabupaten/Kota	Kompleksitas Daerah		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	44	44	44
2	Kabupaten Banyumas	54	54	54
3	Kabupaten Batang	40	40	40
4	Kabupaten Blora	41	41	41
5	Kabupaten Boyolali	49	49	49
6	Kabupaten Brebes	46	46	46
7	Kabupaten Cilacap	51	51	51
8	Kabupaten Demak	40	40	40
9	Kabupaten Grobogan	46	46	46
10	Kabupaten Jepara	40	40	41
11	Kabupaten Karanganyar	40	40	42
12	Kabupaten Kebumen	50	48	48
13	Kabupaten Kendal	47	47	47
14	Kabupaten Klaten	49	51	51
15	Kabupaten Kudus	31	31	33
16	Kabupaten Magelang	46	46	46
17	Kabupaten Pati	48	48	48
18	Kabupaten Pekalongan	46	46	46
19	Kabupaten Pemalang	41	41	41
20	Kabupaten Purbalingga	44	44	45
21	Kabupaten Purworejo	39	41	41
22	Kabupaten Rembang	38	40	40
23	Kabupaten Semarang	44	44	44
24	Kabupaten Sragen	48	48	47
25	Kabupaten Sukoharjo	37	37	40
26	Kabupaten Tegal	47	48	48
27	Kabupaten Temanggung	44	44	44
28	Kabupaten Wonogiri	50	50	50
29	Kabupaten Wonosobo	39	39	40

Lampiran VI Indeks SPBE

No	Kabupaten/Kota	Indeks SPBE		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	1,93	2,42	2,86
2	Kabupaten Banyumas	3,09	2,73	2,6
3	Kabupaten Batang	3,41	3,24	2,85
4	Kabupaten Blora	2,62	2,8	2,36
5	Kabupaten Boyolali	2,85	2,82	2,82
6	Kabupaten Brebes	2,81	2,34	2,4
7	Kabupaten Cilacap	3,13	2,81	2,87
8	Kabupaten Demak	3,74	3,19	3,19
9	Kabupaten Grobogan	3	2,51	3,37
10	Kabupaten Jepara	2,85	3,04	3,14
11	Kabupaten Karanganyar	2,99	2,4	3,32
12	Kabupaten Kebumen	3,42	3,05	3,44
13	Kabupaten Kendal	3,76	3,27	2,93
14	Kabupaten Klaten	3	2,74	2,74
15	Kabupaten Kudus	2,98	2,53	3,38
16	Kabupaten Magelang	2,94	2,67	3,13
17	Kabupaten Pati	3,22	2,75	2,75
18	Kabupaten Pekalongan	3,04	2,63	2,62
19	Kabupaten Pemalang	2,91	2,49	2,23
20	Kabupaten Purbalingga	3,04	2,23	3,2
21	Kabupaten Purworejo	2,96	2,34	2,8
22	Kabupaten Rembang	3,11	2,76	3,19
23	Kabupaten Semarang	3,02	2,36	2,13
24	Kabupaten Sragen	3,35	3,03	3,1
25	Kabupaten Sukoharjo	3,54	2,93	3,42
26	Kabupaten Tegal	2,82	2,55	3,07
27	Kabupaten Temanggung	2,82	2,78	2,78
28	Kabupaten Wonogiri	2,79	2,8	3,34
29	Kabupaten Wonosobo	2,94	2,32	2,9